

**PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN UNTUK  
MENDUKUNG TRANSFORMASI KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN (STUDI KASUS PADA SMP X  
DI KOTA DEPOK)**

<sup>1</sup>Fadhilah Darma Sulisty, <sup>2</sup>Imelda Widjaja, <sup>3</sup>Nadia Putri Josua, <sup>4</sup>Asropi

<sup>1</sup>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>3,4</sup>Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

Email korespondensi: fadhilahdarma26@gmail.com

doi : 10.24832/jpkp.v17i1.830

**ABSTRACT**

*This research aims to evaluate the use of the Education Scorecard platform to support the transformation of education policy at the school level through a study case at a junior high school in Depok Municipality. The research employs a qualitative method. Data were collected through interviews with the school principal, vice principals for public relations and curriculum, and the school operator. Additionally, document analysis and field observations were conducted. The results indicate that the case study school in Depok started utilizing Education Scorecard data in 2023 and found the data presented in the Education Scorecard 2.0 version to be more user-friendly. The Education Scorecard data helps the school to identify educational issues and serves as the basis for the education system evaluation. To optimize the effectiveness of the Education Report, Kemendikbudristek should provide more detailed and specific recommendations for each indicator. The report should clearly define achievement, identify the root causes of problems, and suggest targeted remedial actions that are tailored to the unique challenges and circumstances of each school. The Education Office of Depok City should monitor and assist schools in utilizing the Education Scorecard as the basis for internal evaluation. Additionally, schools need to form a specialized team responsible for ensuring the optimal use of Education Scorecard data.*

**Keywords:** Education Scorecard; education system evaluation; education data utilization; education policy transformation; quality of education

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pemanfaatan platform Rapor Pendidikan untuk mendukung transformasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah melalui studi kasus di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan pada November 2023 melalui wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan operator sekolah, serta analisis dokumen dan observasi lapangan pada lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu sekolah menengah pertama di Kota Depok memanfaatkan data Rapor Pendidikan sejak 2023 dan merasakan bahwa data yang ditampilkan pada pembaruan Rapor Pendidikan 2.0 lebih mudah dibaca. Data Rapor Pendidikan membantu sekolah dalam mengidentifikasi masalah pendidikan di sekolah sebagai dasar evaluasi sistem pendidikan. Agar pemanfaatan Rapor Pendidikan semakin optimal, Kemendikbudristek perlu memperjelas penyajian data setiap indikator, terutama 1) definisi capaian, 2) akar masalah, dan 3) aksi benahi. Rekomendasi yang ditampilkan perlu lebih detail dan spesifik dengan permasalahan atau kondisi sekolah. Dinas Pendidikan Kota Depok perlu melakukan monitoring dan pendampingan kepada sekolah dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar evaluasi internal satuan pendidikan. Selain itu, sekolah perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pemanfaatan optimal data Rapor Pendidikan.

**Kata kunci:** Rapor Pendidikan; evaluasi sistem pendidikan; pemanfaatan data pendidikan; transformasi kebijakan pendidikan; kualitas pendidikan

## PENDAHULUAN

Akses pendidikan di Indonesia merupakan aspek yang terus berkembang. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rentang usia 7-18 tahun telah mencapai 73,42%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak di Indonesia telah mendapatkan akses ke pendidikan formal. Meskipun akses terhadap pendidikan telah ditingkatkan secara signifikan, tantangan utama saat ini adalah memastikan bahwa mutu pendidikan juga merata di semua sekolah di Indonesia, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas (Ismawati dkk., 2023).

Dari segi mutu pendidikan, Indonesia terus melakukan perbaikan. Sejak tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melaksanakan Asesmen Nasional (AN) sebagai dasar pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen Nasional memberikan informasi terkait (a) perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu dan (b) kesenjangan di dalam sistem pendidikan (misalnya: antarkelompok sosial ekonomi, antara sekolah negeri dan swasta, dan antardaerah) (<https://pusmendik.kemdikbud.go.id/an/>).

Pada level global, pemetaan terhadap mutu pendidikan dilakukan menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya melalui *Programme for International Student Assessment (PISA)* (Sjøberg & Jenkins, 2022). Hasil dari survei PISA 2022 mengungkap bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam upaya mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi. Pada PISA tahun 2022, dari 81 negara peserta, Indonesia menduduki posisi 71 untuk kemampuan membaca, 70 untuk matematika, dan 67 untuk sains. Berdasarkan data tersebut, Indonesia masih menunjukkan pencapaian akademik di bawah rata-rata negara-negara OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains. Hal ini menggambarkan tantangan yang signifikan dalam kualitas mutu pendidikan di Indonesia (PISA, 2022). Selain itu, hasil PISA 2022 menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan antarsekolah di Indonesia. Beberapa sekolah

mungkin telah mencapai prestasi yang lebih baik dibandingkan yang lain, namun banyak sekolah masih tertinggal. Hal itu menandakan perlunya perbaikan menyeluruh untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh negeri (PISA, 2022).

Berdasarkan kondisi mutu pendidikan saat ini, ada beberapa tantangan besar yang perlu diatasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tantangan tersebut mencakup masalah *overlapping* dalam penilaian mutu, yang menghasilkan potret yang tidak konsisten. Selain itu, tantangan lain adalah kurangnya orientasi pada mutu belajar dalam kebijakan penjaminan mutu, dengan penekanan yang lebih pada aspek administratif dan input. Terakhir, rendahnya kualitas data juga menjadi kendala dalam pemetaan mutu pendidikan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2021).

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, evaluasi pendidikan memiliki peranan yang krusial. Evaluasi pendidikan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam sistem pendidikan, seperti kualitas guru yang rendah dan ketidakmerataan mutu pendidikan di Indonesia, sehingga solusi yang efektif dan berkelanjutan dapat diterapkan (Astrawan, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2013 di beberapa negara menunjukkan bahwa evaluasi dan asesmen digunakan untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pendidikan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah dan pembuat kebijakan semakin fokus pada evaluasi dan asesmen terhadap murid, guru, pemimpin satuan pendidikan, satuan pendidikan, serta sistem pendidikan secara keseluruhan sebagai basis data untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, kinerja sistem dan satuan pendidikan dinilai berdasarkan capaian pembelajaran murid, peningkatan satuan pendidikan, kepemimpinan, dan praktik pengajaran.

Penelitian OECD pada tahun 2013 menunjukkan bahwa semua negara yang diteliti memiliki kesadaran luas bahwa kerangka evaluasi dan asesmen adalah kunci untuk sistem pendidikan yang lebih kuat dan adil. Beberapa negara, seperti Australia, Kanada, dan Perancis, memiliki kerangka evaluasi dan asesmen yang lengkap dan sangat terstruktur. Sementara itu, negara lain seperti Austria dan Italia memilih pendekatan

yang kurang komprehensif dan kurang terstruktur. Meskipun terdapat perbedaan dalam struktur dan kelengkapan kerangka evaluasi dan asesmen, negara-negara yang terus mengembangkan kerangka penjaminan mutu yang responsif telah menciptakan kebijakan, praktik, dan proses yang solid terkait asesmen murid, penilaian guru dan kepala sekolah, evaluasi internal dan eksternal satuan pendidikan, serta evaluasi sistem. Hal ini memastikan proses evaluasi dan asesmen nasional yang selaras. (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2021).

Pendekatan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara menerapkan asesmen mandiri, sementara yang lain menggunakan audit atau inspeksi eksternal. Kebanyakan negara menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Sebuah badan eksternal memainkan peran penting dalam memastikan konsistensi sistem pendidikan. Penelitian OECD menggambarkan evaluasi satuan pendidikan sebagai proses evaluasi eksternal formal yang wajib, bertujuan untuk memastikan akuntabilitas satuan pendidikan melalui penilaian kualitas oleh pemeriksa eksternal. Di Indonesia, akreditasi satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) sebagai bagian dari proses dan struktur evaluasi eksternal dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2021).

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan perlunya evaluasi sistem pendidikan. Tujuan dari evaluasi sistem pendidikan adalah untuk mengidentifikasi apa yang sudah dan belum berjalan baik dari setiap komponen sistem pendidikan, dengan harapan dapat mencapai tujuan pendidikan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2022). Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan. Dengan kata lain, evaluasi sistem pendidikan bertujuan mendorong sistem pendidikan menjadi sistem yang belajar, yang terus berupaya memperbaiki diri dari waktu ke waktu, sesuai dengan semangat Merdeka Belajar.

Hasil evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi dasar dalam

menetapkan profil pendidikan daerah dan profil pendidikan nasional. Profil pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan yang digunakan sebagai landasan peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan (PP 57/2021).

Pada 1 April 2022 dalam Episode Merdeka Belajar ke-19, Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah meluncurkan platform Rapor Pendidikan (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>). Rapor Pendidikan Indonesia adalah platform digital yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dengan menampilkan hasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat (Permendikbudristek 9/2022). Rapor Pendidikan mencakup indikator-indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas kementerian.

Sebagian besar data profil pendidikan berasal dari Asesmen Nasional yang dipadankan dengan data lain, antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik), *Education Management Information System* (EMIS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) milik Kementerian Agama, platform digital guru dan kepala sekolah, *Tracer Study* SMK, Data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), survei Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan data lain yang relevan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2022).

Profil pendidikan memiliki beberapa keunggulan utama: (1) berfungsi sebagai sumber data utama untuk analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan; (2) terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis; (3) sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik secara internal maupun eksternal; (4) berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar; dan (5) mengurangi beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi penggunaan berbagai aplikasi dalam proses evaluasi internal dan eksternal. (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2022).

Profil pendidikan yang kaya dengan informasi tersebut digunakan sebagai alat refleksi mandiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, serta digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan dan merencanakan program berikutnya. Hasil

penyesuaian kebijakan dan perencanaan program ini diharapkan akan menciptakan perubahan positif dalam mutu pendidikan. Dampak dari peningkatan mutu pendidikan ini akan tercermin pada profil pendidikan pada tahun berikutnya.

Pertama kali diluncurkan pada 1 April 2022, Rapor Pendidikan mengalami pembaruan ke versi 2.0 pada tanggal 10 Mei 2023. Hingga saat artikel ini ditulis, data Rapor Pendidikan telah dikeluarkan dua kali, yaitu pada tahun 2022 dan 2023, dan telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah serta sekolah sebagai dasar perencanaan berbasis data dalam evaluasi sistem pendidikan.

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi pemanfaatan Rapor Pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kemendikbudristek pada tahun 2022, beberapa permasalahan muncul dalam konteks adopsi Rapor Pendidikan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan sekolah, dinas pendidikan, dan *stakeholder* mengenai manfaat dari perencanaan berbasis data dan pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam proses perencanaan pendidikan. Terdapat keraguan yang cukup merata di berbagai dinas pendidikan dan sekolah terkait validitas data atau sumber data profil pendidikan yang disediakan oleh Rapor Pendidikan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2022).

Evaluasi dilakukan melalui pemantauan yang mencakup pemahaman terhadap platform, akses ke platform, dan pemanfaatan data Rapor Pendidikan. Kajian tersebut menguraikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan menyoroti kebutuhan perbaikan dalam pemahaman dan pemanfaatan platform Rapor Pendidikan untuk mencapai visi pendidikan Indonesia yang berkualitas.

Melihat tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu terkait. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana sekolah memanfaatkan data platform Rapor Pendidikan dalam evaluasi sistem pendidikan? Dukungan apa saja yang dibutuhkan sekolah dalam optimalisasi pemanfaatan platform Rapor Pendidikan dalam evaluasi sistem pendidikan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan untuk pemanfaatan Rapor

Pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

### Platform Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan Indonesia merupakan platform yang menampilkan hasil asesmen serta survei tingkat nasional yang melibatkan satuan pendidikan di berbagai daerah (Kemendikbudristek, 2022). Rapor Pendidikan digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah, serta mampu merefleksikan capaian pendidikan (Kiriana & Widiasih, 2023).

Rapor Pendidikan Indonesia berbeda dari Rapor Mutu. Rapor Mutu adalah instrumen penjaminan mutu internal berupa evaluasi diri satuan pendidikan, menggunakan indikator yang mengukur delapan capaian Standar Nasional Pendidikan (Kemendikbudristek, 2022). Tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian delapan indikator berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, dengan data yang bersumber dari Dapodik dan hasil pengisian langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi Rapor Mutu (Shintia dkk., 2023). Sebaliknya, Rapor Pendidikan Indonesia menyediakan laporan evaluasi sistem pendidikan yang merupakan penyempurnaan dari Rapor Mutu. Rapor Pendidikan Indonesia menggunakan indikator yang disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan, tetap mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Dalam Rapor Pendidikan, satuan pendidikan tidak mengisi data langsung ke dalam instrumen; data diambil dari sistem yang sudah ada, termasuk dari Asesmen Nasional, Dapodik, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB), Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber relevan lainnya (Kemendikbudristek, 2022). Hal ini diharapkan mengurangi beban administrasi satuan pendidikan. Rapor Pendidikan Indonesia juga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan berbasis data yang akurat, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah bagian dari Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mewujudkan visi pendidikan berkualitas untuk semua. Penggunaan platform Rapor Pendidikan dalam kerangka perencanaan

berbasis data diharapkan dapat mendorong perbaikan signifikan dalam beberapa aspek, yaitu: (1) meningkatkan partisipasi dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah; (2) meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten; dan (3) menyebarkan layanan pendidikan secara merata di seluruh Indonesia guna mengurangi kesenjangan pendidikan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2023).

Rapor Pendidikan dapat menjadi sumber data tunggal sebagai dasar untuk analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor pendidikan berperan sebagai alat evaluasi yang memuat informasi mengenai kualitas pendidikan di satuan pendidikan atau wilayah tertentu. Pada Rapor Pendidikan, dapat dilihat misalnya, kemampuan kognitif telah memenuhi standar minimum atau belum (Ritonga dkk., 2022). Rapor Pendidikan membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan di lembaga pendidikan, serta menjadi landasan bagi proses refleksi (Shintia dkk., 2023). Selain itu, kehadiran Rapor Pendidikan membuat pengumpulan dan penyajian data menjadi lebih terpusat, sehingga satuan pendidikan tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi berbeda. Pemanfaatan yang optimal dari platform Rapor Pendidikan untuk perencanaan berbasis data mampu menciptakan siklus perbaikan yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2023).

### **Transformasi Kebijakan Pendidikan**

Pengembangan sistem evaluasi pendidikan perlu diselaraskan dengan perubahan dan kemajuan zaman saat ini (Kiriana & Widiasih, 2023). Transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia terus dilakukan mengikuti perubahan dalam dunia pendidikan (Aziz dkk., 2022). Proses transformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan (Merentek dkk., 2023). Transformasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengubah dan menyelaraskan kebijakan-kebijakan pendidikan dengan tujuan mencapai perubahan positif dalam sistem pendidikan. Transformasi ini

dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Lembong dkk., 2023). Transformasi kebijakan pendidikan mencakup perubahan dalam paradigma pembelajaran, kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, penilaian, dan manajemen sistem pendidikan (Mansyur, 2020). Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang responsif, inklusif, relevan, dan mendukung pengembangan potensi maksimal siswa (Lembong dkk., 2023).

Menurut Rambung dkk. (2023), tujuan dari transformasi pendidikan adalah mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas dunia modern abad ke-21. Transformasi kebijakan pendidikan menjadi langkah penting dalam meraih tujuan pendidikan yang lebih baik secara menyeluruh, serta menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia adalah kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2023).

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan lebih banyak kontrol kepada siswa terhadap proses belajar mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih mandiri, bertanggung jawab, dan aktif dalam mengatur pembelajaran mereka (Rambung dkk., 2023). Pendekatan ini juga memberikan kebebasan kepada peserta didik, guru, dan sekolah untuk berinovasi dalam bidang pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar mempertimbangkan aspek-aspek seperti kearifan lokal, budaya, sosio-ekonomi, dan infrastruktur yang memengaruhi proses pembelajaran (Ainia, 2020).

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan (Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data) tahun 2022 yang dilakukan oleh PSKP menemukan berbagai dampak dari transformasi pendidikan melalui kebijakan Rapor Pendidikan di tingkat pemerintah daerah maupun sekolah. Di tingkat pemerintah daerah, Rapor Pendidikan membantu dalam menyusun perencanaan program yang berbasiskan pada data. Berikut



beberapa dampak pemanfaatan Rapor Pendidikan di berbagai daerah:

- a. Dinas Pendidikan Kota Samarinda telah menggunakan Rapor Pendidikan sebagai acuan penyusunan program dan anggaran. Sebelum adanya Rapor Pendidikan, dinas pendidikan mengalami kesulitan ketika diminta oleh BAPPEDA untuk membuat rancangan anggaran kegiatan prioritas. Rapor Pendidikan sangat membantu dinas pendidikan dalam membuat perencanaan, terutama untuk memetakan program prioritas.
- b. Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, dapat dengan mudah melihat kondisi kualitas sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya, berdasarkan data dari Rapor Pendidikan. Kepala dinas memahami satuan pendidikan yang belum baik kualitasnya, sekolah yang butuh bantuan, dengan melihat Rapor Pendidikan.
- c. Dinas Pendidikan Kota Ambon merasakan manfaat Rapor Pendidikan sebagai dasar menyinkronkan perencanaan sekolah dan perencanaan di dinas pendidikan. Adanya hasil analisis Rapor Pendidikan, membantu sekolah dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan sekolah.

Di tingkat sekolah, Rapor Pendidikan juga memberikan dampak yang cukup signifikan. Hasilnya dapat menjadi motivasi sekolah dan para guru untuk melakukan refleksi dan menjadikannya sebagai acuan untuk membuat perencanaan sekolah. Selain itu, Rapor Pendidikan juga membantu sekolah dalam menyusun anggaran dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan selama 14 hari, 9-22 November 2023, melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi sekolah. Wawancara dilakukan dengan *stakeholder* di satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan kurikulum, dan operator sekolah yang mengoperasikan Rapor Pendidikan. Informan-informan tersebut dipilih karena mereka yang memahami tentang Rapor Pendidikan serta sering memanfaatkan Rapor

Pendidikan.

Pemilihan sampel sekolah dilakukan dengan memperhatikan kriteria capaian indikator kemampuan literasi, numerasi, karakter, pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), layanan sekolah untuk murid cerdas istimewa, partisipasi warga dan orang tua, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada kategori baik. Dengan memperhatikan capaian indikator tersebut di Kota Depok, maka terpilih SMP X yang merupakan SMP negeri di Kota Depok sebagai sampel penelitian ini.

Pemilihan sampel data atau lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana sekolah memanfaatkan data Rapor Pendidikan dan dukungan apa yang dibutuhkan sekolah untuk optimalisasi pemanfaatan Rapor Pendidikan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Sekolah Menengah Pertama X di Kota Depok**

SMP X berlokasi di Depok, telah berdiri sejak tahun 1984. Sekolah ini menampung 977 siswa yang tersebar dalam 27 rombongan belajar: kelas VII dengan 9 rombel, kelas VIII dengan 9 rombel, dan kelas IX dengan 9 rombel. Setiap rombel terdiri dari 34 hingga 36 peserta didik. SMP X di Kota Depok telah meraih akreditasi A, serta memiliki 45 orang tenaga pendidik yang terdiri dari 15 tenaga honorer dan 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak tahun 2022, SMP X di Kota Depok telah mengadaptasi Kurikulum Merdeka dengan kategori Mandiri Berubah pada seluruh kelas VII.

### **Profil Rapor Pendidikan SMP X di Kota Depok Tahun 2023**

Profil Rapor Pendidikan SMP X di Kota Depok Tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Dari 15 indikator (A.1, A.2, A.3, C.3, D.1, D.2, D.3, D.4, D.6, D.8, D.10, E.1, E.2, E.3, E.5) yang terdapat dalam data Rapor Pendidikan 2023, hanya 2 indikator yang berada pada tingkat capaian sedang (D.1, E.2). Sementara itu, capaian indikator lainnya berada di kategori baik, serta tidak ada indikator yang berada di

kategori kurang.

Pada indikator kemampuan literasi, SMP X di Kota Depok meraih capaian baik, dengan 95,56% siswa yang telah mencapai kompetensi minimum. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 5,11% dari tahun sebelumnya. Sementara pada indikator kemampuan numerasi, sekolah mencapai tingkat baik dengan 82,22% siswa yang telah mencapai kompetensi minimum, mengalami peningkatan sebesar 5,71%.

Namun, terdapat indikator dengan tingkat capaian sedang, yakni kualitas pembelajaran dengan capaian sebesar 62,97%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,10% dari tahun sebelumnya. Komponen penyusun indikator kualitas pembelajaran adalah manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran. Indikator lain yang mencapai tingkat sedang adalah proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, di angka 30,71%, mengalami penurunan signifikan sebesar 49,56% dari tahun 2022.

Adapun kenaikan tertinggi dari nilai capaian tahun sebelumnya terdapat pada indikator pengalaman pelatihan PTK terkait proporsi guru dan kepala sekolah yang pernah mengikuti pelatihan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan non-PMM, yaitu sebesar 20,04%. Selain itu, pada indikator pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, sekolah mencatat proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring yang tinggi, naik hingga 22,99% dari tahun sebelumnya.

### **Evaluasi Sistem Pendidikan Sekolah Sebelum Adanya Rapor Pendidikan**

Sebelum diberlakukannya Rapor Pendidikan pada tahun 2022, SMP X di Kota Depok telah melaksanakan evaluasi sistem pendidikan melalui serangkaian kegiatan. Awalnya, evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi diri sekolah, yang kemudian berubah menjadi evaluasi delapan Standar Nasional Pendidikan melalui Rapor Mutu. Selain itu, terdapat pula evaluasi melalui kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS). Kegiatan evaluasi ini disupervisi oleh pengawas.

“Evaluasi sistem pendidikan di SMP X berawal dari biasanya dulu evaluasi diri sekolah, lalu berubah menjadi Rapor Mutu yang logonya sarang laba-laba

dan itu melihat ke 8 Standar Pendidikan, kemudian 2022 baru muncul Rapor Pendidikan diambil data 6 dimensi di dalamnya. Sebelum ada Rapor Pendidikan, proses evaluasi pendidikan sekolah melalui kegiatan PKKS (Penilaian Kinerja Kepala Sekolah). Tetap ada evaluasi setiap mau PKKS, dari 8 standar baru hingga ke pembiayaan pengelolaan, dan disupervisi oleh pengawas.” (Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Humas SMP X di Kota Depok, 10 November 2023)

Menurut wakil kepala sekolah (wakasek) bidang humas, evaluasi diri sekolah dianggap sebagai langkah awal dalam memahami pencapaian dan kinerja sekolah. Melibatkan refleksi internal dan analisis aspek-aspek seperti manajemen sekolah, kualitas pengajaran, dan keterlibatan masyarakat sekolah. Rapor Mutu, yang tumbuh dari evaluasi diri sekolah, menjadi instrumen kunci dalam menilai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan merinci evaluasi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan, sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merencanakan langkah-langkah perbaikan.

Selanjutnya, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) digunakan sebagai metode evaluasi pendidikan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dalam aspek kepemimpinan, manajemen, inovasi, dan interaksi dengan *stakeholder*. PKKS menjadi alat evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa kepala sekolah berkinerja optimal dalam mengelola sekolah dan mencapai tujuan pendidikan.

Lebih lanjut, wakasek bidang humas menyebutkan, proses evaluasi sistem pendidikan sebelum adanya Rapor Pendidikan dilakukan secara bertahap dan terpisah. Kadang-kadang terdapat perbedaan data yang membingungkan dalam menentukan kebijakan atau program pembenahan hasil evaluasi. Namun, dengan adanya data Rapor Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan berbasis data di sekolah, kini proses evaluasi menjadi lebih terarah.

Hasil wawancara dengan wakasek bidang kurikulum mengungkap bahwa berdasarkan hasil Rapor Pendidikan, peserta didik SMP X di Kota Depok hanya memiliki kemampuan dasar matematika yang terbatas. Lebih rinci lagi, akar masalahnya adalah penguasaan konsep

yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Dengan ditampilkannya akar masalah ini pada Rapor Pendidikan, wakasek bidang kurikulum menyatakan bahwa tim kurikulum merasa terbantu dalam menyusun program-program kegiatan untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta didik pada aspek tersebut.

Selain kemampuan numerasi, kualitas pembelajaran juga masih perlu perbaikan. Khususnya, metode pembelajaran yang digunakan oleh SMP X di Kota Depok masih perlu perbaikan. Rapor Pendidikan SMP X di Kota Depok menunjukkan belum adanya pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik.

Namun, hasil wawancara dengan wakasek bidang humas dan kurikulum juga mengungkap bahwa terlepas dari kemudahan yang diberikan dalam proses evaluasi, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi SMP X di Kota Depok dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan, yaitu:

1. Sekolah masih kesulitan dalam membaca data rapor, seperti makna atau definisi capaian indikator/dimensi pada rapor yang masih bersifat umum sehingga sulit menerjemahkannya dalam sebuah program sekolah.
2. Akar masalah yang tampil pada Rapor Pendidikan sering kali tidak sesuai dengan kondisi asli yang ada di sekolah, sehingga pihak sekolah mengalami kebingungan dalam membaca akar masalah ini, sehingga sering kali menebak-nebak kesesuaiannya.
3. Pada saat kegiatan bimbingan teknis, materi yang disampaikan terlihat sudah cukup jelas dan komprehensif, tetapi pada praktiknya ketika kembali ke sekolah, pihak sekolah tetap kesulitan untuk memahami penerapan hasil analisis Rapor Pendidikan.

### **Pemanfaatan Rapor Pendidikan di Sekolah**

Penggunaan Rapor Pendidikan di SMP X di Kota Depok telah mengalami perkembangan sejak diperkenalkan pada 1 April 2022. Awalnya, sekolah enggan mengimplementasikan karena dianggap sulit dipahami dan kurangnya sosialisasi terkait penggunaannya. Pada tahun 2022, sekolah hanya mengetahui tentang Rapor Pendidikan tanpa aktif memanfaatkan datanya.

“Dulu Rapor Pendidikan 2022 waktu awal rilis belum terlihat ke arah mana, jadi belum paham. Pada 2022, sekolah hanya sekadar mengetahui saja adanya Rapor Pendidikan. Rilisnya Rapor Pendidikan versi 2.0 pada Maret 2023, kami baru merasa tujuannya lebih terbaca dan jelas, sehingga kami mengetahui capaian mutu pendidikan di sekolah selama ini sudah sampai mana.” (Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMP X di Kota Depok, 11 November 2023)

Perubahan signifikan terjadi ketika diluncurkan Rapor Pendidikan versi 2.0 pada Maret 2023. Sekolah merasa bahwa data yang ditampilkan lebih mudah dibaca. Selain itu, sosialisasi serta bimbingan teknis dari Kemendikbudristek melalui direktorat dan Unit Pelaksana Teknis seperti Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) Jawa Barat juga sudah lebih banyak.

Proses pemanfaatan Rapor Pendidikan di SMP X di Kota Depok dimulai setelah data rapor dapat diunduh. Kemudian, surat dari Kemendikbudristek dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Depok, lalu dinas pendidikan bersurat ke sekolah untuk memberitahu siapa saja yang berhak melihat dan mengunduh rapor, seperti kepala sekolah, operator sekolah, dan guru dengan akun masing-masing. Meskipun pada awal rilis, tampilan di akun guru masih terbatas untuk beberapa tampilan.

Dalam tahap tindak lanjut evaluasi data Rapor Pendidikan, sekolah hanya memfokuskan perhatian pada capaian yang berada pada tingkat sedang. Bagi capaian yang sudah tergolong baik dengan warna hijau, baik itu masuk dalam usulan prioritas rekomendasi ataupun tidak, sekolah tidak memberikan perhatian khusus terhadap prioritas tersebut. Sebaliknya, sekolah lebih cenderung mengambil langkah untuk mempertahankan program-program yang sudah dijalankan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.

Menurut informasi dari wakasek bidang humas, beberapa kebijakan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi pendidikan dengan merujuk pada data Rapor Pendidikan, antara lain:

1. *Sharing* praktik baik dan *lesson study*: Guru yang memiliki metode pengajaran yang unggul, terutama guru PNS yang menonjol, diundang sebagai narasumber untuk berbagi



pengalaman kepada guru-guru lainnya. Kegiatan ini baru dilakukan dalam periode dua minggu terakhir saat pengumpulan data, sementara praktik baik telah dilakukan satu bulan sebelum pengumpulan data dilakukan.

2. Menganggarkan kegiatan pengembangan pembelajaran: Sekolah menggunakan dana dari BOS Reguler untuk mendukung kegiatan melalui Aplikasi Rencana dan Anggaran Sekolah (ARKAS), khususnya dalam pengembangan inovasi terkait metode pembelajaran. Selain itu, diadakan *workshop* untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan metode dan strategi pembelajaran di semua mata pelajaran.
3. Mendorong penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM): Guru didorong untuk lebih aktif menggunakan PMM sebagai acuan dalam metode pembelajaran guna meningkatkan variasi dalam proses pengajaran. Sekolah berharap bahwa semakin banyak guru yang menggunakan PMM.
4. Sosialisasi visi misi sekolah: Adanya permasalahan capaian visi misi sekolah yang masih berada pada tingkat sedang dalam data Rapor Pendidikan mendorong sekolah mengambil kebijakan untuk meningkatkan sosialisasi kepada siswa. Selain itu, poster visi misi sekolah akan lebih banyak disebarluaskan di seluruh kawasan sekolah.

Sementara untuk capaian literasi, dalam Rapor Pendidikan 2023, SMP X telah meraih capaian yang memuaskan. Menurut hasil wawancara, hal ini disebabkan oleh keberhasilan sekolah dalam melaksanakan sejumlah program pendukung yang telah diterapkan bahkan sebelum Rapor Pendidikan diluncurkan.

Salah satu program yang mendorong capaian positif dalam indikator literasi adalah pembuatan karya sastra buku antologi, yang melatih keterampilan menulis siswa. Selain itu, ada juga upaya pembiasaan literasi setiap hari Kamis, di mana siswa secara bergantian diberi kesempatan untuk menceritakan kembali buku yang mereka baca, dengan melibatkan minimal dua siswa.

Pelaksanaan kegiatan *Readathon (Read Marathon)* di lapangan sekolah di akhir bulan juga menjadi salah satu inisiatif yang berhasil

dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa. Dalam acara ini, antara dua hingga lima siswa tampil di depan seluruh siswa untuk bercerita, berpidato, membacakan puisi, dan sebagainya.

Selanjutnya, pembinaan persiapan lomba bidang literasi, seperti pada bulan bahasa, memberikan wadah bagi siswa untuk berkompetisi dan mengasah kemampuan literasi mereka. Sekolah yakin bahwa keberhasilan dalam implementasi program-program ini memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian literasi siswa dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **Pendampingan dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Kota Depok**

Dalam mengimplementasikan kebijakan atau program baru, pentingnya pendampingan dan sosialisasi tidak dapat diabaikan. Menurut teori implementasi kebijakan (Astrawan, 2023), pendampingan memiliki peran krusial dalam memastikan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang efektif. Menurut Van Meter & Van Horn (1975), pendampingan adalah suatu bentuk dukungan teknis dan administratif yang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan atau program. Pendampingan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup bimbingan praktis, diskusi interaktif, dan pemecahan masalah yang muncul dalam pelaksanaan. Dalam konteks pendidikan, pendampingan dapat membantu sekolah dalam mengatasi hambatan-hambatan konkret, meningkatkan keterampilan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bimbingan teknis yang diberikan oleh Kemendikbudristek, khususnya melalui Direktorat SMP dan BBPMP Jawa Barat, berfokus pada pemanfaatan data Rapor Pendidikan. Kegiatan pelatihan selama 1-3 hari dirancang untuk menyampaikan materi terkait evaluasi, pencarian akar masalah, hingga perencanaan strategis. Pelatihan ini dianggap sangat membantu SMP X di Kota Depok dalam memahami kompleksitas Rapor Pendidikan. Wakasek bidang kurikulum menyatakan bahwa sekolah berharap agar pelatihan ini bersifat berkelanjutan. Dengan kata lain, tidak hanya sebagai acara satu kali, melainkan sebagai rangkaian kegiatan yang terus-menerus untuk memperdalam pemahaman dan mendukung

penerapan di lingkungan sekolah.

Dinas Pendidikan Kota Depok juga turut melakukan pendampingan dengan cara mendorong sekolah, termasuk SMP X di Kota Depok, untuk terus memanfaatkan data rapor pendidikan dalam evaluasi pendidikan. Peran pengawas sekolah menjadi kunci dalam memastikan penerapan yang efektif. Pengawas sekolah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan supervisi. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan pemerintah, tetapi juga sebagai sumber informasi dan bimbingan. Setiap kesulitan atau pertanyaan dapat diajukan kepada pengawas, yang secara aktif terlibat dalam proses pendampingan. Kegiatan bersama pengawas melibatkan berbagai bentuk, mulai dari *zoom webinar* hingga pendampingan langsung. Informasi, panduan, dan diskusi bersama menjadi bagian dari upaya ini.

#### **Kendala pada Pemanfaatan Rapor Pendidikan di Sekolah**

Dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan pada SMP X di Kota Depok, terdapat sejumlah kendala yang menjadi hambatan bagi sekolah dalam mengoptimalkan manfaat data yang tersedia. *Pertama*, sekolah menghadapi kesulitan dalam membaca dan menginterpretasikan data yang disajikan. Memaknai capaian pada rapor masih menjadi tantangan dan membuat pihak sekolah kesulitan menemukan akar permasalahan yang mendasar.

“Kami masih sulit dalam membaca data pada Rapor Pendidikan, seperti definisi capaian pada rapor masih bersifat umum. Pencarian akar masalah yang terjadi di sekolah, kami merasa masih sulit menyesuaikan dengan keadaan aslinya, alhasil semuanya masih kira-kira, tidak tahu akar masalah pastinya.” (Wawancara dengan operator SMP X di Kota Depok, 11 November 2023)

Selanjutnya, penilaian yang diberikan pada rapor bersifat keseluruhan dan kurang memberikan rincian pada setiap komponen yang dinilai. Hal ini membuat sekolah sulit mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait performa masing-masing aspek. Selain itu, kesulitan dalam menyesuaikan keadaan asli sekolah dengan data yang terbaca juga menjadi kendala, sehingga

menghasilkan data yang bersifat perkiraan dan belum dapat dipastikan.

Keterbatasan sosialisasi terkait Rapor Pendidikan turut menjadi kendala, di mana sekolah merasa perlunya bimbingan teknis yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman. Waktu bimbingan teknis dan sosialisasi yang terbatas, yang hanya dilaksanakan sekali dengan rentan waktu tertentu, dirasa kurang bagi sekolah untuk mengoptimalkan pemahaman materi.

Selanjutnya, sekolah mengalami kesulitan dalam mencari akar masalah yang mendasar, sehingga upaya perbaikan menjadi kurang terarah. Kurangnya penjelasan terperinci pada setiap komponen yang dinilai dalam rapor turut membuat sulit untuk fokus pada area yang memerlukan perbaikan secara spesifik. Terakhir, minimnya dukungan untuk mengatasi kendala, baik teknis maupun nonteknis, juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan secara optimal.

#### **SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN**

SMP X di Kota Depok telah memanfaatkan platform Rapor Pendidikan dalam evaluasi sistem pendidikan dengan langkah-langkah tertentu. Pada awalnya, sekolah enggan mengimplementasikan platform ini karena dianggap sulit dipahami dan minim sosialisasi. Namun, perubahan signifikan terjadi pada versi 2.0 Rapor Pendidikan pada Maret 2023. Sekolah merasa bahwa data yang ditampilkan lebih mudah dibaca, dan adanya sosialisasi serta bimbingan teknis dari Kemendikbudristek membuatnya lebih dapat dimanfaatkan.

Dalam proses evaluasi sistem pendidikan melalui platform Rapor Pendidikan, sekolah mengambil beberapa langkah. Langkah pertama adalah memahami data yang tersedia, lalu melakukan pencarian akar masalah, dan merancang program-program perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Rapor Pendidikan.

Meskipun sekolah mengakui manfaat penggunaan platform Rapor Pendidikan sebagai acuan dalam evaluasi pendidikan, mereka juga menyampaikan beberapa usulan untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan platform ini. *Pertama*, sekolah berharap ada penjelasan terperinci pada setiap komponen yang dinilai dalam rapor. Mereka percaya bahwa

hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi akar masalah secara lebih mendalam, sehingga upaya perbaikan dapat lebih terarah. *Kedua*, sekolah juga mengharapkan adanya pendampingan berkelanjutan, terutama dalam hal bimbingan teknis dari Kemendikbudristek. Dengan pendampingan yang berlangsung secara terus-menerus, sekolah berharap dapat memperdalam pemahaman dan pemanfaatan data rapor pendidikan dengan lebih baik.

Berdasarkan simpulan penelitian, terdapat beberapa usulan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan data Rapor Pendidikan sebagai dasar evaluasi sistem pendidikan. Rekomendasi tersebut disampaikan sesuai peran tiap pemangku kepentingan.

Kemendikbudristek perlu untuk mengambil langkah-langkah berikut. *Pertama*, melakukan pembaruan data pada Rapor Pendidikan terkait penjelasan setiap indikator, seperti definisi capaian, akar masalah, dan aksi benahi untuk ditampilkan lebih detail dan spesifik dengan permasalahan atau kondisi sekolah. Hal ini agar sekolah dapat mengetahui dengan pasti kondisi dan akar masalah terhadap data Rapor Pendidikannya. *Kedua*, membuat mekanisme sosialisasi dan bimbingan teknis yang efektif dan berkelanjutan sampai dengan pendampingan pemanfaatannya di sekolah. Pendampingan ini agar sekolah tidak kebingungan saat penerapan langsung di sekolah setelah bimbingan teknis berakhir.

Sementara untuk Dinas Pendidikan Kota Depok, diusulkan beberapa opsi berikut. *Pertama*, perlu melakukan monitoring praktik pemanfaatan data Rapor Pendidikan dalam perencanaan berbasis data kepada setiap sekolah di bawah naungannya. *Kedua*, menyiapkan fasilitas pendampingan dan pengaduan untuk mendampingi sekolah dalam pemanfaatan data Rapor Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan berbasis data evaluasi sistem pendidikan sekolah.

Usulan kebijakan yang diajukan bagi SMP X di Kota Depok, antara lain: *Pertama*, membentuk tim khusus di sekolah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pemanfaatan optimal data Rapor Pendidikan. *Kedua*, melakukan optimalisasi dalam pemanfaatan data Rapor Pendidikan yang tidak hanya melihat capaian yang sedang saja, tapi keseluruhan prioritas rekomendasi yang ada di Rapor Pendidikan.

## PUSTAKA ACUAN

- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
- Astrawan, M. I. (2023, 15 Juli). *Kebijakan pendidikan di Indonesia ditinjau dari Sustainable Development Goals*. BEM FPSI Universitas Muhammadiyah Malang. <https://bem-fpsi.umm.ac.id/id/berita/kebijakan-pendidikan-di-indonesia-ditinjau-dari-sustainable-development-goals.html>
- Aziz, F. Z., Setiawan, F., Hariadi, D., & Setianingsih, F. N. (2022). Transformasi kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia sebagai landasan pengelolaan pendidikan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2), 217-228.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka Partisipasi Sekolah (APS)*. <https://www.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-sekolah-a-p-s-.html>. Diakses pada 15 September 2023.
- Ismawati, E., Amertawengrum, I. P., & Anindita, K. A. (2023). Portrait of education in Indonesia: Learning from PISA results 2015 to present. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 22(1), 321-340. <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.1.18>
- Kemendikbudristek. (2019). *Hasil PISA Indonesia 2018: Akses makin meluas, saatnya tingkatkan kualitas*.
- Kemendikbudristek. (2022). *Rapor Pendidikan Indonesia*.
- Kemendikbudristek. (2023). *Episode Merdeka Belajar 19 - Rapor Pendidikan*.
- Kiriana, I. N., & Widiasih, N. N. S. (2023). Implementasi Rapor Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. *Widya Accarya*, 14(2), 156-164.
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar sebagai transformasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765-777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>

- Mansyur, A. R. (2020). Dampak Covid-19 terhadap dinamika pembelajaran di Indonesia. *Education and learning journal*, 1(2), 113–123.
- Merentek, T. C., Sumual, T. E., Usoh, E. J., & Kampilong, J. K. (2023). Perencanaan sumber daya manusia dalam pendidikan masa depan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 40–46. <https://doi.org/10.19109/ELIDARE.V9I1.16516>
- OECD (2013). *Synergies for better learning: An international perspective on evaluation and assessment, oecd reviews of evaluation and assessment in education*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. PISA, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2021). *Kajian Akademik Evaluasi Sistem Pendidikan*. [https://pskp.kemdikbud.go.id/assets\\_front/images/produk/1-gtk/buku/1665198079\\_PSKP\\_2021\\_Kajian\\_Akademik\\_Sistem\\_Evaluasi\\_Pendidikan.pdf](https://pskp.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/buku/1665198079_PSKP_2021_Kajian_Akademik_Sistem_Evaluasi_Pendidikan.pdf)
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2022). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan (Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data)*. (belum dipublikasikan)
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2023). *Dashboard adaption rate Rapor Pendidikan*.
- Pusmendik. <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/an/> diakses 20 Februari 2024.
- Rambung, O. S., Sion, S., Bungamawelona, B., Puang, Y. B., & Salenda, S. (2023). Transformasi kebijakan pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 598-612.
- Rapor Pendidikan <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id> diakses 23 November 2023.
- Ritonga, A. A., Lubis, Y. W., Masitha, S., & Harahap, C. P. (2022). Program Sekolah Penggerak sebagai inovasi meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 104267 Pegajahan. *Jurnal Pendidikan*, 31(2), 195-206.
- Shintia, D., Asbari, M., Khairunisa, F., & Azizah, N. (2023). Rapor Pendidikan Indonesia: Quo vadis kualitas pendidikan Indonesia?. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 18-21.
- Sjøberg, S., & Jenkins, E. (2022). PISA: A political project and a research agenda. *Studies in Science Education*, 58(1), 1-14. <https://doi.org/10.1080/03057267.2020.1824473>.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.